



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2015

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 perlu disusun dan dilaksanakan Rencana Strategis setiap Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1. . .

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sebagai panduan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019.
- (2) Dalam hal adanya perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar . . .

- 4 -

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 795

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik



MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/ N/B/ NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI													
Sasaran Strategis 1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi						12.800	14.200	15.500	17.200	17.900	Deputi RB, Kunwas	N
	Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/ Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	KL:47%; Prov: 15%; Kab/Kota: 5%	K/L: 54% Prov: 30%; Kab/Kota: 15%	KL:61%; Prov: 40%; Kab/Kota: 25%	KL:68%; Prov: 50%; Kab/Kota: 35%	KL:75%; Prov: 60%; Kab/Kota: 45%							
	Tingkat persepsi masyarakat terhadap RB	6,4	6,7	7	7,3	7,6							
Sasaran Strategis 2	Peningkatan kelembagaan dan talaksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses						14.000	17.500	18.900	21.800	23.000	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	N
	Persentase IP pusat yang menyelesaikan penataan bisnis proses antar unit dalam satu instansi pemerintah	10%	20%	30%	40%	50%							
	Persentase lembaga yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi/audit	100%	100%	100%	100%	100%							
	Jumlah urusan pemerintah strategis yang diriviu bisnis prosesnya	3 urusan	3 urusan	3 urusan	3 urusan	3 urusan							
Sasaran Strategis 3	Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis Elektronik						1.300	2.800	3.300	3.700	4.100	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	B
	Jumlah IP yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	100 IP	200 IP	300 IP	400 IP	500 IP							
Sasaran Strategis 4	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten						9.400	10.500	11.400	12.900	14.100	Deputi SDM Aparatur	B
	Persentase IP yang sudah menerapkan pengisian jabatan sesuai standar kompetensi jabatan	20%	40%	60%	80%	100%							
	Persentase IP yang menerapkan pengembangan kompetensi minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun	20%	40%	60%	80%	100%							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Sasaran Strategis 5	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif						9.300	9.600	10.000	10.600	11.000	Deputi SDM Aparatur	B
	Persentase IP yang menerapkan pengisian JPT secara terbuka	20%	40%	60%	80%	100%							
	Jumlah IP yang menerapkan sistem penilaian kinerja individu "Baik"	10 IP	50 IP	75 IP	100 IP	200 IP							
Sasaran Strategis 6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja						7.005	7.950	8.850	10.200	10.900	Deputi RB, Kunwas	B
	Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional	55	60	65	70	75							
	Persentase IP Nilai Akuntabilitas Kinerja "baik"	KL:65%; Prov: 39%; Kab/Kota: 12%	KL:70%; Prov: 48%; Kab/Kota: 21%	KL:75%; Prov: 57%; Kab/Kota: 31%	KL:80%; Prov: 66%; Kab/Kota: 40%	KL:85%; Prov: 75%; Kab/Kota: 50%							
Sasaran Strategis 7	Meningkatnya penerapan sistem integritas						7.005	7.950	8.850	10.200	10.900	Deputi RB, Kunwas	B
	Skor integritas nasional	45	50	55	60	65							
	Persentase IP yang penerapan sistem integritas "baik"	46%	52%	58%	64%	70%							
	Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	9 IP	9 IP	9 IP	9 IP	9 IP							
Sasaran Strategis 8	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik						5.300	5.500	5.700	6.000	6.100	Deputi Pelayanan Publik	B
	Jumlah IP yang inovasinya mendapat pengakuan internasional	10 IP	10 IP	10 IP	10 IP	10 IP							
Sasaran Strategis 9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik						9.700	11.600	12.800	14.800	16.100	Deputi Pelayanan Publik	K
	Indeks Pelayanan Publik Nasional	2	2,5	2,75	3	3,5							
Sasaran Strategis 10	Terwujudnya Kem. PANRB yg efektif dan efisien						23.800	18.700	20.500	22.200	22.900	Sekretariat Kementerian	K
	Indeks RB "Baik"	BB	BB	BB	A	A							
	Tingkat Efektivitas organisasi	Kategori II (60)	Kategori II (65)	Kategori II (70)	Kategori III (75)	Kategori III (80)							
	Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan	50%	55%	65%	75%	80%							
Sasaran Strategis 11	Terwujudnya Kem. PANRB yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi						23.800	18.700	20.500	22.200	22.900	Sekretariat Kementerian	K
	Opini BPK "WTP"	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	A	A	A	A	A							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Sasaran Strategis 12	Terwujudnya pelayanan publik kem. PANRB yang berkualitas						23.800	18.700	20.500	22.200	22.900	Sekretariat Kementerian	K
	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KemenPANRB	7.22	7.35	7.50	8.00	8.50							
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI							73.300	85.000	93.000	105.000	112.000		
Sasaran Program 1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi												
	Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/ Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	KL:47%; Prov: 15%; Kab/Kota: 5%	K/L: 54% Prov: 30%; Kab/Kota: 15%	KL:61%; Prov: 40%; Kab/Kota: 25%	KL:68%; Prov: 50%; Kab/Kota: 35%	KL:75%; Prov: 60%; Kab/Kota: 45%							
	Tingkat persepsi masyarakat terhadap RB	6,4	6,7	7	7,3	7,6							
Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan							5.600	5.900	6.200	6.900	7.100	Deputi RB, Kunwas	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PANRB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan												
	- Jumlah tim RB nasional yang melaksanakan fungsi pengendalian RB nasional	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim							
	- Jumlah laporan kinerja pemerintah pusat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan							
Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan							5.300	5.800	6.100	6.500	6.900	Deputi RB, Kunwas	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya efektivitas kebijakan RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan												
	-Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan							
	-Jumlah RUU SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) rancangan kebijakan	1 RUU	1 RUU	UU	Peraturan pelaksanaan	Peraturan pelaksanaan							
Sasaran Kegiatan 2	Tersusunnya peraturan yang memberikan sanksi yang berat bagi aparatur dan pelaksana hukum melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Program Lintas Bidang)												
	- Jumlah edaran untuk himbauan/peringatan mengenai sanksi	1 SE	-	1 SE	-	-							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan 3: Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi							1.900	2.500	3.200	3.800	3.900	Deputi RB, Kunwas	
Sasaran Kegiatan 1	Terlaksananya Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi												
	–Jumlah Sistem PMPRB yang Disempurnakan	1 Sistem	1 Sistem	Implementasi	Implementasi	Implementasi							
Sasaran Kegiatan 2	Tersusunnya peta kapasitas birokrasi (pusat dan daerah) dalam pelaksanaan good governance (Program lintas)												
	–Jumlah laporan asesmen kapasitas birokrasi (pusat dan daerah)	1 laporan Asesmen	1 laporan Asesmen	1 laporan Asesmen	1 laporan Asesmen	1 laporan Asesmen							
Sasaran Program 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja												
	Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional	55	60	65	70	75							
	Persentase IP Nilai Akuntabilitas Kinerja “baik”	KL:65%; Prov: 39%; Kab/Kota: 12%	KL:70%; Prov: 48%; Kab/Kota: 21%	KL:75%; Prov: 57%; Kab/Kota: 31%	KL:80%; Prov: 66%; Kab/Kota: 40%	KL:85%; Prov: 75%; Kab/Kota: 50%							
Sasaran Program 3	Meningkatnya penerapan sistem integritas												
	Skor integritas nasional	45	50	55	60	65							
	Persentase IP yang penerapan sistem integritas “baik”	46%	52%	58%	64%	70%							
	Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	9 IP	9 IP	9 IP	9 IP	9 IP							
Sasaran Program 4	Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN dan administrasi pemerintahan												
	Persentase penanganan permasalahan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN dan administrasi pemerintahan	70%	75%	80%	85%	90%							
Kegiatan 1: Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I							3.400	3.900	4.400	5.000	5.400	Deputi RB, Kunwas	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I												
	–Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)	KL:47%; Prov: 15%; Kab/Kota: 5%	KL:54%; Prov: 30%; Kab/Kota: 15%	KL:61%; Prov: 40%; Kab/Kota: 25%	KL:68%; Prov: 50%; Kab/Kota: 35%	KL:75%; Prov: 60%; Kab/Kota: 45%							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	-Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang Akuntabilitas Kinerja Baik (Kategori "B" Ke atas)	KL:65%; Prov: 39%; Kab/Kota: 12%	KL:70%; Prov: 48%; Kab/Kota: 21%	KL:75%; Prov: 57%; Kab/Kota: 31%	KL:80%; Prov: 66%; Kab/Kota: 40%	KL:85%; Prov: 75%; Kab/Kota: 50%							
	-Jumlah IP yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM	3 IP	3 IP	3 IP	3 IP	3 IP							
Kegiatan 2: Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II							3.300	3.800	4.300	5.000	5.300	Deputi RB, Kunwas	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah II												
	-Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)	KL:47%; Prov: 15%; Kab/Kota: 5%	KL:54%; Prov: 30%; Kab/Kota: 15%	KL:61%; Prov: 40%; Kab/Kota: 25%	KL:68%; Prov: 50%; Kab/Kota: 35%	KL:75%; Prov: 60%; Kab/Kota: 45%							
	-Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang Akuntabilitas Kinerja Baik (Kategori "B" Ke atas)	KL:65%; Prov: 39%; Kab/Kota: 12%	KL:70%; Prov: 48%; Kab/Kota: 21%	KL:75%; Prov: 57%; Kab/Kota: 31%	KL:80%; Prov: 66%; Kab/Kota: 40%	KL:85%; Prov: 75%; Kab/Kota: 50%							
	-Jumlah IP yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM	3 IP	3 IP	3 IP	3 IP	3 IP							
Kegiatan 3 : Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III							3.500	3.800	4.300	5.000	5.300	Deputi RB, Kunwas	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah III												
	-Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)	KL:47%; Prov: 15%; Kab/Kota: 5%	KL:54%; Prov: 30%; Kab/Kota: 15%	KL:61%; Prov: 40%; Kab/Kota: 25%	KL:68%; Prov: 50%; Kab/Kota: 35%	KL:75%; Prov: 60%; Kab/Kota: 45%							
	-Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang Akuntabilitas Kinerja Baik (Kategori "B" Ke atas)	KL:65%; Prov: 39%; Kab/Kota: 12%	KL:70%; Prov: 48%; Kab/Kota: 21%	KL:75%; Prov: 57%; Kab/Kota: 31%	KL:80%; Prov: 66%; Kab/Kota: 40%	KL:85%; Prov: 75%; Kab/Kota: 50%							
	-Jumlah IP yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM	3 IP	3 IP	3 IP	3 IP	3 IP							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan 4: Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur							3.900	4.400	4.700	5.400	5.800	Deputi RB, Kunwas	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur yang transparan dan akuntabel												
	- Jumlah kebijakan di bidang pengaduan masyarakat dan aparatur	1 draft Kebijakan	1 Kebijakan										
	- Persentase laporan pengaduan aparatur yang disalurkan dan jumlah kasus strategis pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah ditindaklanjuti.	5%	5%	5%	5%	5%							
Sasaran Program 5	Peningkatan kelembagaan dan talaksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses												
	Persentase IP pusat yang menyelesaikan penataan bisnis proses antar unit dalam satu instansi pemerintah	10%	20%	30%	40%	50%							
	Jumlah urusan pemerintah strategis yang diriviu bisnis prosesnya	3 urusan	3 urusan	3 urusan	3 urusan	3 urusan							
	Persentase lembaga yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi/audit	100%	100%	100%	100%	100%							
Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana							3.400	4.000	4.200	4.500	4.800	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana												
	-Jumlah PP sebagai implementasi UU Administrasi Pemerintahan	2 RPP	2 PP	-	-	-							
	-Jumlah Peraturan Per-UU-an terkait hubungan kewenangan pusat dan daerah	1 Kajian Kebijakan	1 Draft/ Rancangan Kebijakan	1 Kebijakan (Penetapan dan Implementasi)	Implementasi	Implementasi							
Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana							1.400	2.500	2.900	3.500	3.700	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana yang komprehensif												

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	-Jumlah Peraturan Per-UU-an terkait kelembagaan organisasi pemerintah pusat	1 Kajian Kebijakan	1 Draft/ Rancangan Kebijakan	1 Kebijakan (Penetapan dan Implementasi)	Implementasi	Implementasi								
Kegiatan 3: Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I							1.600	2.500	2.800	3.500	3.700	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana		
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kelembagaan pemerintah bidang polhukam dan daerah yang tepat fungsi dan ukuran													
	-Persentase K/L bidang polhukam yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana	100%	100%	100%	100%	100%								
	-Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi/audit	100%	100%	100%	100%	100%								
	-Jumlah urusan pemerintah strategis yang direviu bussiness processnya	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan								
Sasaran Kegiatan 2	Terlaksananya pilot project format birokrasi pemerintah desa yang dapat direplikasikan atau dikembangkan secara nasional (Quick Wins)													
	-Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Format Birokrasi Pemerintahan Desa	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-								
Sasaran Kegiatan 3	Pilot project pengaturan kewenangan secara bertahap untuk kabupaten dan kota serta provinsi di NTB, Banten Jabar, dilaksanakan oleh Kemendagri, Kemenkeu, Kemensos, Kemendiknas, KemenPU, KemenPANRB (Quick Wins)													
	-Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Kewenangan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-								
Kegiatan 4: Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II							2.700	3.200	3.500	4.200	4.400	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana		
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kelembagaan pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman yang tepat fungsi dan ukuran													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/ N/B/ NS/BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	-Persentase K/L bidang perekonomian dan kemaritiman yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana.	100%	100%	100%	100%	100%								
	-Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi/audit	100%	100%	100%	100%	100%								
	-Jumlah urusan pemerintah strategis yang direviu <i>bussiness processnya</i>	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan								
Kegiatan 5: Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III														
Kegiatan 5: Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III														
							2.300	2.700	3.200	3.700	4.300		Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kelembagaan pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tepat fungsi dan ukuran													
	-Persentase K/L bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana.	100%	100%	100%	100%	100%								
	-Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi/audit	100%	100%	100%	100%	100%								
	-Jumlah urusan pemerintah strategis yang direviu <i>bussiness processnya</i>	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan	1 urusan								
Sasaran Kegiatan 2	Penguatan koordinasi kelembagaan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan event Asian Games 2018 (Quick Wins)													
	-Penataan Kemenpora, KOI dan KONI	50%	100%											
Sasaran Program 6	Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis Elektronik													
	Jumlah IP yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	100 IP	200 IP	300 IP	400 IP	500 IP								
Kegiatan 1: Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government														
							1.300	2.800	3.300	3.700	4.100		Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelaksanaan e-government yang efektif dan efisien													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	-Jumlah Peraturan Per-UU-an terkait pengembangan e-government	1 Kajian Kebijakan	1 Draft/ Rancangan Kebijakan	1 Kebijakan (Penetapan dan Implementasi)	Implementasi	Implementasi								
	-Jumlah Perpres tentang e-government	1 Perpres	pilot project	Implementasi	Implementasi	Implementasi								
Sasaran Program 7	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten													
	Persentase IP yang sudah menerapkan pengisian jabatan sesuai standar kompetensi jabatan	20%	40%	60%	80%	100%								
	Persentase IP yang menerapkan pengembangan kompetensi minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun	20%	40%	60%	80%	100%								
Sasaran Program 8	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif													
	Persentase IP yang menerapkan pengisian JPT secara terbuka	20%	40%	60%	80%	100%								
	Jumlah IP yang menerapkan sistem penilaian kinerja individu "Baik"	10 IP	50 IP	75 IP	100 IP	200 IP								
Sasaran Program 9	Terwujudnya pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Jabatan													
	Persentase ASN memiliki Penilaian Kinerja "baik"	15%	30%	45%	60%	75%								
Kegiatan 1: Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur								2.200	2.400	2.700	3.200	3.500	Deputi SDM Aparatur	
Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya standarisasi jabatan dan pengembangan SDM Aparatur (ASN) berbasis kompetensi													
	- Jumlah kebijakan standarisasi jabatan, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (ASN)	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan								
	- Jumlah IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi	100	200	300	400	500								
	- Persentase Pegawai ASN di tiap IP yang mendapatkan hak mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	10%	20%	40%	60%	80%								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/ N/B/ NS/BS		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
Sasaran Program 10	Terwujudnya perencanaan & rekrutmen SDM Aparatur secara terbuka dan obyektif														
	Persentase IP menerapkan Sisinfo ASN	20%	40%	60%	80%	100%									
	Persentase IP menerapkan e-formasi sesuai ketentuan	20%	40%	60%	80%	100%									
	Persentase IP menerapkan CAT sesuai ketentuan	80%	100%	100%	100%	100%									
Kegiatan 1: Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur									2.300	2.700	3.200	3.600	4.100	Deputi SDM Aparatur	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Perencanaan SDM Aparatur (ASN)														
	-Jumlah Kebijakan Perencanaan kebutuhan SDM Aparatur (ASN)	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan									
	-Persentase IP yang menggunakan sistem informasi perencanaan SDM Aparatur (ASN) berbasis elektronik sesuai ketentuan	20%	40%	60%	80%	100%									
Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur									7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	Deputi SDM Aparatur	
Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya pengadaan SDM Aparatur (ASN) yang transparan, obyektif dan bebas KKN														
	-Jumlah kebijakan Sistem Pengadaan dan Evaluasi pengadaan SDM Aparatur (ASN)	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan									
	-Persentase IP yang telah melaksanakan Pengadaan CPNS dengan sistem terkomputerisasi	80%	100%	100%	100%	100%									
Sasaran Kegiatan 2	Terlaksananya juknis sistem rekrutmen di masing-masing K/L (Program Lintas Bidang)														
	-Jumlah juknis rekrutmen di masing-masing K/L	1	1	-	-	-									
Sasaran Kegiatan 3	Tersusunnya sistem rekrutmen aparatur negara (Program Lintas Bidang)														
	-Jumlah regulasi tentang sistem rekrutmen aparatur negara	1 Permenpan	1 Permenpan	1 Permenpan	-	-									
Sasaran Program 11	Terwujudnya remunerasi berbasis Jabatan dan Kinerja														
	Persentase IP evjab divalidasi	25%	40%	75%	100%	100%									

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan 1: Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur							2.200	2.500	2.700	3.200	3.600	Deputi SDM Aparatur	
Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya sistem remunerasi berbasis jabatan dan kinerja												
	– Jumlah kebijakan tentang kesejahteraan SDM Aparatur	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan							
	– Persentase IP yang telah divalidasi hasil evaluasi jabatannya	25%	40%	75%	100%	100%							
Sasaran Program 12	Terwujudnya SDM Aparatur berintegritas												
	Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin	10%	20%	30%	40%	50%							
	Persentase IP yang menegakkan peraturan disiplin dan integritas "Baik"	20%	40%	60%	80%	100%							
Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur							4.900	5.300	5.500	6.100	6.400	Deputi SDM Aparatur	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Program SDM Aparatur												
	–Jumlah kebijakan di bidang penyusunan program SDM Aparatur dan Pembinaan Integritas SDM Aparatur (ASN)	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan							
	–Persentase IP yang menegakkan peraturan disiplin dan integritas SDM Aparatur (ASN)	20%	40%	60%	80%	100%							
	–Persentase IP yang menerapkan ketentuan Manajemen ASN	20%	40%	60%	80%	100%							
Sasaran Kegiatan 2	Tersusunnya pengarusutamaan nilai-nilai wasbang dan karakter bangsa (Program Lintas Bidang)												
	–Jumlah design pengarusutamaan nilai-nilai wasbang dan karakter bangsa bagi SDM Aparatur	FGD dan drafting	finalisasi grand design	Sosialisasi K/L Pusat (100%)	sosialisasi daerah (50%)	sosialisasi pusat dan daerah (100%)							
Sasaran Program 13	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik												
	Jumlah IP yang inovasinya mendapat pengakuan internasional	10 IP	10 IP	10 IP	10 IP	10 IP							
Kegiatan 1: Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik							5.300	5.500	5.700	6.000	6.100	Deputi Pelayanan Publik	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Inovasi yang terintegrasi												

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/ N/B/ NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	-Jumlah inovasi di bidang Pelayanan Publik	400 Inovasi	400 Inovasi	400 Inovasi	400 Inovasi	400 Inovasi							
	-Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan replikasi dan gelar pelayanan publik	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit							
Sasaran Program 14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik												
	Indeks Pelayanan Publik Nasional	2	2,5	2,75	3	3,5							
Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik							2.400	2.600	2.900	3.300	3.900	Deputi Pelayanan Publik	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas kebijakan dan program Pelayanan Publik												
	-Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan							
	-Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang menerapkan Kebijakan bidang Pelayanan Publik	85 K/L/Prov/Kab/Kota	85 K/L/Prov/Kab/Kota	85 K/L/Prov/Kab/Kota	85 K/L/Prov/Kab/Kota	85 K/L/Prov/Kab/Kota							
	-Presentase Pengaduan pelayanan publik yang ditindaklanjuti	75%	80%	90%	95%	95%							
	-Jumlah Prov/Kab/Kota yang menerapkan sistem pengelolaan pengaduan	60 Prov/Kab/Kota	60 Prov/Kab/Kota	60 Prov/Kab/Kota	60 Prov/Kab/Kota	60 Prov/Kab/Kota							
Kegiatan 2: Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I							2.300	2.900	3.100	3.700	4.000	Deputi Pelayanan Publik	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Wilayah I												
	-Jumlah unit kerja yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)	90 Unit kerja	180 unit kerja	270 unit kerja	360 unit kerja	450 unit kerja							
	-Jumlah Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik	90 Unit kerja	180 unit kerja	270 unit kerja	360 unit kerja	450 unit kerja							
Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II							2.500	2.700	3.000	3.600	3.800	Deputi Pelayanan Publik	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Wilayah II												
	-Jumlah unit kerja yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)	90 Unit kerja	180 unit kerja	270 unit kerja	360 unit kerja	450 unit kerja							
	-Jumlah Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik	90 Unit kerja	180 unit kerja	270 unit kerja	360 unit kerja	450 unit kerja							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/ N/B/ NS/BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan 4: Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III							2.500	3.400	3.800	4.200	4.400	Deputi Pelayanan Publik	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Wilayah III												
	- Jumlah unit kerja yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)	90 Unit kerja	180 unit kerja	270 unit kerja	360 unit kerja	450 unit kerja							
	- Jumlah Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik	90 Unit kerja	180 unit kerja	270 unit kerja	360 unit kerja	450 unit kerja							
Sasaran Kegiatan 2	terwujudnya gerakan aparat menuju Indonesia ramah (Quick Wins)												
	- Jumlah IP yang telah mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pelayanan Publik	90 IP	90 IP	90 IP	90 IP	90 IP							
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							61.100	48.700	53.700	57.900	59.600		
Sasaran Program 1	Terwujudnya Kem. PANRB yg efektif dan efisien												
	Indeks RB "Baik"	BB	BB	BB	A	A							
	Tingkat Efektivitas organisasi	Kategori II (60)	Kategori II (65)	Kategori II (70)	Kategori III (75)	Kategori III (80)							
	Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan	50%	55%	65%	75%	80%							
Sasaran Program 2	Terwujudnya Kem. PANRB yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi												
	Opini BPK "WTP"	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	A	A	A	A	A							
Sasaran Program 3	Terwujudnya pelayanan publik kem. PANRB yang berkualitas												
	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KemenPANRB	7.22	7.35	7.50	8.00	8.50							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/ N/B/ NS/BS				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
Kegiatan 1: Pengelolaan dan Pembinaan Hukum, Komunikasi Publik dan Sistem Informasi											7.500	7.875	8.269	8.682	9.029	Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Dukungan Hukum dan Informasi Yang Responsif dan Dukungan teknologi terkini																
	- Persentase kebijakan yang di harmonisasi dan tidak overlapping serta terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%											
	- Persentase analisis dan bantuan hukum yang efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%											
	- Jumlah publikasi dan pemberitaan yang dimuat di media massa	240 berita	240 berita	265 berita	290 berita	315 berita											
	- Jumlah Aplikasi yang terbangun	5 aplikasi	5 aplikasi	7 aplikasi	8 aplikasi	8 aplikasi											
	- Jaminan kualitas jaringan inter dan intra net	95%	95%	95%	95%	95%											
	- Indeks implementasi e-Government	2,66	2,66	2,75	2,90	3,00											
	- Skor keterbukaan informasi publik	85	85	90	95	100											
	- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait KemenPANRB yang diselesaikan	90%	90%	95%	100%	100%											
	- Persentase pelayanan perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%											
Kegiatan 2: Pengelolaan dan Pembinaan Manajemen Kinerja dan Penganggaran, Kerjasama Lembaga dan Pelaporan											2.751	2.888	3.033	3.184	3.312	Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Anggaran																
	- Persentase dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%											
	- Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	- Persentase dokumen kerjasama tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%								
	- Persentase rekomendasi pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%								
	- Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Kem. PANRB, Sekretariat, Biro PMK	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan								
	- Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan RB Internal Kem. PANRB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
Kegiatan 3: Pengelolaan dan Pembinaan SDM, Keuangan dan Perkantoran							97.596	102.476	107.600	112.980	117.499	Biro SDM dan Umum		
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya efektifitas Organisasi dan tata laksana													
	- Tingkat efektivitas organisasi	Kategori II (60)	Kategori II (65)	Kategori II (70)	Kategori III (75)	Kategori III (80)								
	- Jumlah unit kerja yang selesai analisis jabatannya	4	4	5	5	-								
	- Persentase sarana prasarana terpelihara	80%	80%	80%	80%	80%								
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya profesionalisme ASN Kem. PANRB													
	- Lama waktu pengisian jabatan lowong	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan								
	- Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM diinput dalam e-formasi tepat waktu	1	1	1	1	1								
	- Persentase standar kompetensi jabatan yang disusun	60%	60%	70%	80%	90%								
	- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ pengembangan	140 Pegawai	160 Pegawai	180 Pegawai	200 Pegawai	200 Pegawai								
	- Dokumen perencanaan karir individu yang terselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								
	- Persentase penempatan yang sesuai persyaratan	50%	60%	65%	70%	75%								
	- Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin	100%	100%	100%	100%	100%								
	- Persentase tingkat kehadiran pegawai Kem. PANRB	80%	80%	80%	80%	80%								
	- Jumlah kebijakan sistem remunerasi berbasis kinerja di Kem. PANRB yang disusun	1 Permenpan	-	-	-	-								
	- Persentase penyampaian data dukung untuk pembayaran tunjangan kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%								
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan													
	- Persentase penggunaan e-procurement terhadap total belanja pengadaan	30%	40%	50%	60%	70%								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/N/B/NS/BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan													
	- Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana	80%	80%	80%	80%	80%								
	- Persentase proses pencairan anggaran tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%								
Kegiatan 4: Pembinaan dan Pengawasan Intern dan Quality Assurance							2.855	2.998	3.148	3.305	3.437	Inspektorat		
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja													
	- Jumlah unit kerja eselon I yang menerapkan SAKIP sesuai dengan peraturan	5 unit kerja eselon I	5 unit kerja eselon I	5 unit kerja eselon I	5 unit kerja eselon I	5 unit kerja eselon I								
	- Jumlah unit kerja eselon I yang minimal mendapat predikat "A" SAKIP nya	2 unit kerja eselon I	3 unit kerja eselon I	4 unit kerja eselon I	5 unit kerja eselon I	5 unit kerja eselon I								
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan													
	- Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
	- Jumlah unit kerja eselon I yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	4 unit kerja eselon I	4 unit kerja eselon I	4 unit kerja eselon I	5 unit kerja eselon I	5 unit kerja eselon I								
	- Tingkat kematangan implementasi SPIP	1	2	2	3	3								
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK													
	-Persentase rekomendasi audit keuangan BPK yang ditindaklanjuti	75%	75%	80%	85%	90%								
	- Persentase rekomendasi audit kinerja BPK yang ditindaklanjuti	50%	55%	65%	70%	80%								
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi													
	- Persentase laporan gratifikasi yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%								
	- Jumlah unit kerja berpredikat WBK	1 unit kerja	1 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	3 unit kerja								
Kegiatan 5: Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN							1.250	1.313	1.378	1.447	1.505	Staf Ahli		
Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Perumusan kebijakan bidang PANRB													
	Jumlah telaahan strategis bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan								
	Jumlah telaahan strategis mengenai isu aktual mengenai pemerintahan dan otonomi daerah	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L/ N/B/ NS/BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Jumlah telaahan strategis tentang tumpang tindih peraturan perundang-undangan bidang PAN RB	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan								
	Jumlah Laporan Kegiatan pelaksanaan Pilot Project pengembangan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
	Jumlah telaahan strategis di bidang Kebijakan Publik terkait PANRB	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan	1 Telaahan								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PAN DAN RB							10.500	7.500	8.000	8.500	9.000			
Kegiatan 1: Pengelolaan Sarana Prasarana Kementerian							10.500	7.500	8.000	8.500	9.000	Biro SDM dan Umum		
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya rasio ketersediaan sarana dan prasarana Kementerian													
	- Persentase sarana prasarana tersedia	80%	80%	80%	80%	80%								